**PEMBANGUNAN SOSIAL-POLITIK INDONESIA: MENILIK MASALAH KLASIK DI KALIMANTAN TENGAH**

**Mochammad Doddy Syahirul Alam**

Jurusan Administrasi Negara Universitas Palangka Raya

**Abstrak** : Pembangunan sosial politik di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini terus berlangsung secara berkesinambungan. Beberapa sektor andalan dalam pembangunan meliputi sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan masih menjadi idola dan sekaligus sebagai kontributor terbesar pendapatan daerah. Perkembangan ketiga sektor secara tidak langsung memberikan *multiplayer efect* bagi kondisi sosial politik di Kalteng. Dari aspek sosial perkembangan dan dinamika pembangunan akan memberikan tekanan masyarakat lokal untu mampu bersaing dengan masyarakat pendatang, masalah pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan menjadi salah satu isu krusial dalam perkembangannya. Dari aspek politik kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam semakin hari semakin menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat khususnya terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perkebunan dan pertambangan. Eksploitasi dibidang perkebunan dan pertambangan mulai memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan hidup Kalimantan Tengah.

***Keywords***: Pembangunan Sosial Politik, Kalimantan Tengah

**Pendahuluan**

Pembangunan bisa diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan (Conyers dan Hills, 1989; Jameson dan Wilber, 1979). Sebagai suatu perubahan terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Menurut Todaro (1997), kemajuan ekonomi merupakan komponen penting dalam pembangunan. Namun demikian, pembangunan bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Pembangunan harus ditujukan lebih dari sekedar peningkatan kemakmuran manusia secara material dan finansial. Pembangunan harus dipandang sebagai

proses multi-dimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Disamping upaya-upaya peningkatan pendapatan secara ekonomi, pembangunan juga memerlukan perubahan- perubahan struktur-struktur sosial, politik, sikap-sikap masyarakat, termasuk kebiasaan dan keyakinan. Selain itu pembangunan juga tidak dapat dipisahkan dari proses global. Pada intinya, pembangunan akan memberikan hasil yang optimal apabila memperhatikan berbagai dimensi secara seimbang dan proporsional.

Krisis multi-dimensi yang dihadapi bangsa Indonesia sejak tahun 1998 tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga merambat kepada aspek pembangunan sosial-politik. Ternyata, kondisi ekonomi dan sosial-politik bangsa Indonesia sangat rapuh dan rentan terhadap terpaan arus globalisasi. Hal itu menuntut semua komponen bangsa untuk mengkaji ulang paradigma pembangunan ekonomi dan tidak terkecuali paradigma pembangunan sosial- politik yang penting dan mendesak untuk disusun mengingat semakin banyaknya permasalahan sosial-politik yang muncul sebagai dampak pembangunan.

Masalah-masalah seperti kemiskinan, kriminalitas, kerusakan lingkungan, dan isu-isu dehumanisasi yang lain memperlihatkan sepertinya pembangunan di Indonesia jalan di tempat. Namun menilik ke setiap daerah, akan dapat terlihat gambaran yang lebih jelas dan komprehensif seperti apa pembangunan yang selama ini sedang terjadi. Seperti halnya dengan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Melalui adanya *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh pejabat daerah, akademisi, masyarakat, birokrat pemerintah daerah, NGO, swasta

serta dilanjutkan melalui *depth interview* terhadap budayawan setempat, setidaknya dapat diperoleh gambaran masalah pembangunan sosial-politik apa saja yang sedang terjadi di Kalimantan Tengah sehingga dapat menjadi suatu masukan yang berarti bagi perencanaan strategis pembangunan sosial-politik Indonesia walaupun belum dapat digeneralisir dan membutuhkan penelitian yang lebih mendalam.

**Perubahan Pembangunan Sosial-Politik Di Kalimantan Tengah**

Pembangunan Sosial dapat ditafsirkan sebagai pembangunan yang melibatkan manusia secara langsung. Seperti telah diuraikan, bahwa pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rata-rata perorangan (*per capita income*) tidak selamanya meningkatkan pendapatan perorangan secara merata. Dan logika teori ekonomi pembangunan tentang "penetesan ke bawah" sudah semakin menampakkan kelemahan-kelamahannya. Proses penetesan ke bawah tidak terjadi dengan sendirinya tanpa kemampuan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk aktif meraih peluang-peluang yang muncul atau menciptakan peluangnya sendiri untuk memperoleh penghasilan. Golongan ekonomi kuat tidak dapat diharapkan secara sukarela menyalurkan sumberdayanya kepada golongan ekonomi lemah. Pemerataan tidak berjalan otomatis, dan tidak cukup hanya dengan menghimbau dan mengandalkan niat baik golongan ekonomi kuat untuk menolong masyarakat miskin.

Menarik garis kemunculan pembangunan sosial sebagai suatu paradigma tidak terlepas dari pola pembangunan yang pernah dilakukan di negara-negara

maju. Kesadaran itu muncul sekitar tahun 1960-an, justru karena terlihat begitu banyak kemiskinan dan pengangguran. Sehingga sekitar tahun 1970-an pembangunan ekonomi didefinisikan kembali dalam rangka pengurangan atau pemberantasan kemiskinan, ketidakmerataan, dan pengangguran dalam hubungannya dengan perekonomian yang sedang tumbuh. Profesor Dudley Seers seperti dikutip Todaro menjelaskan:

Pertanyaan-pertanyaan yang harus dipermasalahkan tentang pembangunan suatu negara adalah: Apa yang terjadi dengan kemiskinan? dengan pengangguran? dengan ketidakmerataan? Apabila ketiga hal itu semakin menurun maka pasti pembangunan sedang terjadi di negara tersebut. Apabila satu atau dua dari ketiga masalah tersebut ternyata menjadi semakin buruk, apalagi kalau semuanya, maka agak aneh kalau kita menyebut pembangunan, meskipun pendapatan per kapita meningkat dua kali (M. P. Todaro, 1989)

Secara sistemik, tingkat kemajuan dari suatu sistem tidak lepas dari keberadaan komponen yang paling lemah. Ini berarti tingkat kemajuan suatu negara juga akan ditentukan oleh kondisi-kondisi daerah tertinggal yang ada yang dalam hal ini yaitu desa/ kelurahan.1 Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah sebanyak 164.221 jiwa (6,77%) dan pada September 2011 sebanyak 150.021 jiwa (6,64%) dengan pencapaian tersebut telah memposisikan Kalteng pada urutan ke tujuh terendah tingkat kemiskinan di Indonesia setelah (secara berurutan) DKI Jakarta, Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Banten,dan Kalimantan Timur. Bila dipahami lebih dalam, data yang dilansir oleh

Badan Pusat Statistik Kalteng tersebut, isu pentingnya bukanlah pada selisih

1 Istilah kelurahan dipakai untuk menunjuk struktur pemerintah desa di wilayah kotamadya, dengan pimpinannya Lurah. H. Khairuddin, Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2000. Hal. 3

besaran atau tingkat penurunan dari tahun ke tahun, melainkan pada fenomena pengonsentrasian penduduk miskin di daerah perdesaan dan hampir 67% penduduk Kalteng berada di daerah perdesaan.2

Perkembangan penanaman modal di Kalimantan Tengah mengalami perubahan/peningkatan yang luar biasa. Jumlah perusahaan Penanaman Modal Asing tahun 2010 sebanyak 183 buah perusahaan dengan rencana investasi 18,5 Milyar Dollar lebih dan realisasi 5,0 Milyar Dollar lebih. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri sebanyak 191 buah perusahaan dengan rencana investasi sebesar 186,0 Triliun Rupiah lebih dan realisasi sebesar 19,8 Triliun Rupiah lebih. Dominasi perusahaan berada pada bidang perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara. Di bagian barat, terhampar tanaman perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 900.000Ha, perkebunan karet tersebar dihampir semua

kawasan, sedangkan potensi tambang batu bara berada di bagian timur-utara, dengan jumlah potensi cadangan sekitar 4,8 milyar ton.3 Dengan melihat data tersebut diatas, Kalimantan Tengah berpotensi menjadi provinsi yang maju dan sejahtera. Begitu juga dengan ibukota provinsi Palangka Raya yang di isukan akan menjadi ibukota pemerintahan Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kalteng, sudah termuat untuk mulai berkoordinasi dengan pihak terkait guna menghasilkan tata ruang yang baik serta kaijan tentang potensi sumberdaya, sarana dan prasarana.4

2Panusunan Siregar, Penduduk Desa Yang Termiskinkan, Harian Kalteng Pos, 16 Januari 2012.,Hal.11

3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-

2015, Pemprov Kalteng,. Hal. 48-49,IV-5-IV-6

4 Ibid,. Hal. VII-1-VII-2

Perbandingan antara jumlah penduduk miskin dengan realisasi investasi di Kalimantan Tengah memberikan gambaran adanya permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah. Seharusnya proses perubahan yang dimaksudkan adalah ke arah yang lebih baik, tetapi sebaliknya proses perubahan yang terjadi di dominasi oleh masalah-masalah yang muncul satu persatu ke permukaan dan jika tidak diatasi dengan baik dapat membahayakan proses pembangunan yang dimaksudkan. Apa saja masalah tersebut:

1. Persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) masih menjadi polemik di Komisi IV DPR RI, bukan berarti masalah tersebut menjadi berlarut-larut. Belum jelas kapan ujung dari penyelesaiannya. Jadi, memang harus segera dituntaskan, karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas dalam hal sertifikasi lahan. Selain itu, dampak lainnya adalah kerugian perusahaan perkebunan dan penghasilan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan, jika status hukum lahan belum ada kejelasan. Hal tersebut yang perlu dipikirkan oleh Komisi IV DPR RI, agar masalah RTRWP dapat diselesaikan lebih cepat. Terlebih lagi, dari jumlah 33 provinsi di negeri ini, sebagian besar penyelesaian RTRWP-nya belum tuntas dibahas di Komisi IV DPR RI. Contohnya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), sekitar

236.000 hektar area Kajian Lingkungan Hutan Strategis (KLH), sejauh ini belum rampung pembahasannya. “Yang menjadi ganjalan terhadap RTRWP Kalteng adalah area lahan seluas 236 ribu hektare, yang masih menjadi perdebatan di Komisi IV” Dampak dari hal tersebut, kalau DPR tidak memutuskan segera, berarti Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat

menerbitkan sertifikat yang selama ini diimpikan sebagian besar masyarakat Kalteng. Akibatnya, pemerintah pun tidak bisa menindaklanjuti proses persertifikatan, karena menunggu RTRWP Kalteng dibahas DPR RI. Diharapkan ada penegasan MA agar Perda No 8 Tahun 2003 bisa diterapkan. “Area yang masih jadi perdebatan di DPR RI, ternyata kawasannya sudah berupa perumahan dan perkantoran. Misalnya, Kantor Gubernur, masih dalam status Hutan Produksi,” akibat kendala penerbitan sertifikat, pinjaman warga ke perbankan tidak akan bisa terealisasikan. Dengan begitu, tentu saja, sangat merugikan masyarakat Bumi Tambun Bungai yang diwacanakan menjadi Ibukota Negara.

1. Investasi Sawit Terancam: Beberapa waktu lalu pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengeluhkan persoalan RTRWP di Kalteng. Akibat belum ada kejelasan hukum atas lahan yang dijadikan areal perkebunan kelapa sawit, investor terancam rugi. Apalagi dari 1,2 juta hektar lahan perkebunan sawit, 960.000 hektar masih kategori bermasalah dalam hal RTRWP. Ketua Gapki Kalteng, Dwi Darmawan, menyesali masih berlarutnya penyelesaian RTRWP di Kalteng. Sebab, tidak sedikit anggotanya mengalami kerugian investasi, yakni pemusnahan pembibitan sawit lantaran sudah terlalu tua. “Bibit itu terpaksa dimusnahkan, tidak bisa dilanjutkan, lantaran status lahannya belum ada kejelasan hukum. Hal ini yang sangat merugikan anggota kami,” paparnya. Dijelaskan Dwi, hampir 90 persen anggotanya mengalami kerugian akibat belum selesainya RTRWP di Kalteng. Sekaligus tidak bisa menjalankan program revitalisasi perkebunan untuk rakyat. “Karena BPN

tidak bisa memproses sertifikat, maka pihak perbankan pun tidak akan mengucurkan kredit tanpa agunan. Ini salah satu kendala program revitalisasi perkebunan,” ungkapnya. Dwi menambahkan, belum tuntasnya masalah RTRWP di Kalteng, maka kepastian hukum lahan perkebunan sawit seluas

960.000 hektar dari total 1,2 juta hektar akan menjadi persoalan panjang.

Baik, bagi masyarakat, maupun investor sawit. “Jika lahan lokasi perkebunan sawit seluas itu dikembalikan statusnya sebagai hutan, maka sebanyak

288.000 orang pekerja sawit akan menjadi pengangguran. Saya berharap pemerintah perlu memikirkan hal tersebut,” jelasnya. Harapan serupa juga disampaikan Ketua Umum Gapki Pusat, Joefly J Bachroeny. Menurut dia, pemerintah pusat segera menyelesaikan RTRWP Kalteng demi kelangsungan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. “Ketika bertatap muka dengan Presiden, beliau menjelaskan penyelesaian tata ruang provinsi akan dilakukan secara bijaksana, tidak akan merugikan investasi yang telah selama ini dilakukan sesuai peraturan yang berlaku,” jelas Joefly kepada wartawan beberapa waktu lalu. Dia berharap, pemerintah daerah dan pusat bisa berkoordinasi tentang persoalan tersebut. Juga, tentang pemberian izin investasi sawit, Wali Kota/Bupati menggunakan dasar hukum Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang RTRWP Kalteng.

1. Moratorium Izin Kelapa Sawit dan Tambang: Kerusakan hutan di Kalimantan Tengah akhirnya disadari dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Kalimantan

Tengah Agustin Teras Narang. Gubernur menyatakan sudah meneken surat keputusan tentang moratorium (penghentian sementara) pembukaan hutan

untuk kelapa sawit. Penegasan ini dikatakan Teras Narang saat pembukaan kongres ke IV *Sawit Watch* di Hotel Aquarius, Palangkaraya, Sabtu, 17 November 2012. Menurut dia, untuk menggodok masalah perda ini, Pemprov Kalteng banyak mendapatkan bantuan dari sejumlah LSM dan pemerhati lingkungan. "Saya banyak mendapatkan masukan dan juga kritik. Semuanya saya terima, termasuk kritikan itu," kata dia. Asal masukan tersebut kontruktif, konsitional, dan ada solusinya. "Pemerhati sawit banyak yang membantu saya untuk membuat perda tentang perkebunanan. Apa kelemahan, apa yang harus diperbaiki," ia menambahkan. Karena itu, menurut Teras Narang, untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, sekarang ini dia sudah mengeluarkan kebijakan penghentian sementara (moratorium) perizinan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Moratorium itu sangat penting untuk penyempurnaan perizinan yang telah dikeluarkan daerah. Dengan adanya moratorium, ia ingin para bupati itu mau melihat ke belakang agar tidak membuka dan memberikan izin sembarangan. Sebelum keluar keputusan moratorium, pemerintah Kalimantan Tengah sudah bekerja sama dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyangkut masalah audit dengan perizinan. Sebagai kabupaten percontohan, ditetapkan Kabupaten Barito Selatan untuk pengukuhan kawasan hutan. Untuk masalah audit perizinan kabupaten, percontohannya ada tiga, yakni Kapuas, Barito Selatan, dan Kotawaringin Timur. Data Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menyebutkan luas Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah seluas 2.793.794,94 hektar untuk dikuasai sekitar 234 perusahaan sawit. Di lain pihak, luas perkebunan yang baru mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) sekitar 783.629,97 hektar. "Dari data ini sektar 81 perusahaan sawit yang belum memiliki HGU," ujar Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah Badan Pertanahan Nasional, Sudarman.

1. Kepala Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Tengah Ir. H. Syahrin Daulay mengatakan, tercatat enam permasalahan yang kini menjadi perhatian pihaknya terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) setempat. "Pada Perda RPJMD No.1/2011, ada enam permasalahan dan empat isu strategis penting bagi pembangunan Kalteng 2010-2015". Menurutnya, keenam permasalahan itu adalah penyediaan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, kualitas dan keterjangkauan pendidikan, kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas birokrasi, dan permasalahan pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan empat isu strategis meliputi kebijakan internasional, nasional, regional, dan komitmen internasional terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global, ujarnya. Diutarakannya, untuk permasalahan infrastruktur adalah belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan. Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan. "Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat, masih rendahnya kualitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antarkabupaten/kota," ucapnya. Luas wilayah

Kalteng yang dihuni penduduk relatif sedikit dan terpencar-pencar, menyebabkan tingkat pelayanannya menjadi sulit dilakukan. Dijelaskannya, masalah pengembangan ekonomi lokal, pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan belum dikelola secara professional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional. "Masalah lainnya adalah masih rendahnya produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Belum terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu, masih rendahknya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan pengelolaan detinasi wisata dan masih rendahnya kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal," katanya. Kemudian, lanjut dia, begitu juga masih rendahnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerja sama investasi, terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif, masih rendahnya produktivitas dan daya saing produk koperasi dan UMKM juga menjadi masalah dalam pengembangan ekonomi lokal. "Bahkan belum optimalnya penyelenggaraan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi berskala besar, pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis, menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor lain," ucapnya menandaskan.

1. Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Ujang Iskandar menilai Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) layak dimekarkan menjadi tiga provinsi, yakni wilayah tengah, barat, dan wilayah utara. "Kalimantan Tengah seharusnya bisa menjadi tiga provinsi," kata Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar, di

Pangkalan Bun, Kamis. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Murung Raya, wilayah Utara Kalimantan Tengah, Willy M Yoseph, juga menilai pemekaran bisa dilakukan guna kepentingan kesejahteraan, seperti mengatasi kemiskinan, kebodohan, serta keterisolasian. Menurut Ujang, bila semangat kedua daerah itu bertemu yakni antara barat dan utara maka Kalimantan Tengah yang kini beribukota di wilayah Tengah di Kota Palangkaraya, seharusnya dapat dimekarkan sesuai kebutuhan daerah. Selama ini di wilayah Kotawaringin baik Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau dan Sukamara banyak aspirasi yang menginginkan pembentukan daerah otonom baru berupa Provinsi Kotawaringin Raya. Sementara aspirasi sebagian warga Barito, meliputi Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur juga menyuarakan aspirasi serupa membentuk Provinsi Barito Raya. Ujang menegaskan yang paling penting saat ini adalah antara Kalimantan Tengah wilayah utara dan wilayah barat harus menunjukkan tekad bersama memajukan Kalteng di daerah masing-masing. Sebelumnya, pengamat hukum dan pemerintahan Universitas Palangka Raya, Rakhmadiansyah Bagan SH Mhum menilai wacana pemekaran Provinsi Kalteng menjadi tiga daerah otonom tetap layak diperjuangkan sepanjang dilakukan dalam koridor hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku. "Bila memang telah memenuhi ketentuan, sah-sah saja banyak pihak yang ingin memperjuangkan pemekaran wilayah menjadi provinsi baru yakni Kotawaringin Raya dan Barito Raya," kata Rakhmadiansyah Bagan. Menurut dia, wacana pemekaran wilayah di Kalteng, terutama Provinsi Kotawaringin Raya yang akhir-akhir ini menguat,

secara teknis kewilayahan telah memadai karena membawahi lima daerah otonom. Sementara wacana pemekaran wilayah hulu Kalteng menjadi Provinsi Barito Raya, masih terkendala dalam aspek tersebut, karena baru mencakup empat daerah otonom. Sehingga masih membutuhkan upaya lain untuk memenuhi aspek kewilayahan itu, misalnya dengan membentuk daerah otonom baru semacam Kota Ampah (wilayah Kabupaten Barito timur), kata Rakhmadiansyah yang juga Dosen Fakultas Hukum Unpar. "Wacana pemekaran Barito Raya menurut catatan sejarah sebenarnya telah mengemuka sejak sebelum terbentuknya Provinsi Kalteng yakni sekitar tahun 1957. Namun hingga kini masih sulit direalisasikan," jelasnya. Di sisi lain, wacana Provinsi Kotawaringin Raya yang mengemuka belakangan ini justru lebih kuat dan memenuhi aturan hukum dan perundangan. "Tidak ada masalah diwacanakan, bahkan untuk Kotawaringin Raya juga bisa diimplementasikan hingga ada `aksi`. Persoalannya apakah dibutuhkan atau tidak. Kalau tidak dibutuhkan kenapa harus buru-buru," ungkapnya

1. Belum terpenuhinya kebutuhan listrik masih menjadi permasalahan serius di wilayah Kalteng. Terlebih hingga sekarang ketersediaan pasokan listrik hanya sebesar 125.941 MW (Mega Watt). Namun, daya terpasang pembangkit listrik di Kalteng saat ini hanya sebesar 90.713 MW. Sehingga, selisihnya diperoleh dari suplai sistem Kalselteng yang dikirim melalui jaringan transmisi 150 KV (Kilo Volt) baik ke gardu induk Kapuas, Pulang Pisau dan Palangka Raya. Ditambah daya dari mesin-mesin sewa yang ada di Palangka Raya, Kasongan dan Sampit dengan total 141.358 MW. Wakil Gubernur Kalteng Ir H Achmad

Diran mengungkapkan, kebutuhan energi listrik di Kalteng kedepan diperkirakan naik sebesar kurang lebih 15 persen. Hal ini sejalan dengan pesatnya pembangunan di segala sektor di Kalteng khususnya Palangka Raya. "Langkah-langkah guna memenuhi kebutuhan tersebut, diantaranya telah dimulainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulang Pisau 2X60 MW, pembangunan PLTU Sampit 2X25 MW". Hal ini, kata Diran, juga didukung dengan percepatan pembangunan transmisi tegangan tinggi 150 KV Palangka Raya - Sampit dan 2012 Sampit Pangkalan Bun. Selain itu juga pembangunan PLTU 2X100 MW di Kabupaten Katingan. Sedangkan, kondisi kelistrikan desa di Kalteng sampai akhir 2011, kata Diran, dari 1.510 desa dengan jumlah rumah tangga 617.052 yang sudah menikmati penerangan listrik baru sebanyak 949 desa. Sedangkan desa dengan jumlah rumah tangga berlistrik 379.263 atau rasio desa berlistrik pada akhir tahun 2011 sebesar 65.6 persen. rasio elektrifikasi atau rumah tangga berlistrik sampai akhir tahun 2011 sebesar 61.4 persen. Saat ini, katanya, ada sekitar

561 desa pada 237.789 rumah tangga yang belum menikmati penerangan listrik di Kalteng. Diran menanggapi adanya keluhan masyarakat terhadap tingginya biaya pasang baru maupun pemasangan instalasi. Dikatakan dia, saat ini pemprov sedang mempersiapkan edaran yang mengatur tentang besarnya biaya pemasangan instalasi di tiap-tiap kabupaten/kota. "Untuk biaya pasang baru telah ditetapkan secara resmi oleh PT PLN sebesar Rp 337.000 untuk daya 450 VA (Volt Ampera)," ujarnya. Dikatakan Diran, untuk mempercepat pembangunan listrik desa, sejak 2011 lalu pemerintah dari

tingkat pusat hingga daerah bersama PLN sejak 2011 telah membuat kesepakatan bahwa pada 2012 ini akan berupaya melistriki 5000 rumah tangga per tahunnya. Diran menyebutkan, rasio elektrifikasi di bawah 50 persen mampu melistriki minimal 3000 rumah tangga per tahun. Sedangkan, rasio elektrifikasinya di atas 50 persen akan melistriki minimal 200 rumah tangga per tahun. Dia mengatakan, PLN beserta Satuan Kerja (Satker) Listrik Perdesaan melistriki 50.000 rumah tangga per tahun. Sehingga, harapannya, pada 2015 rasio elektrifikasi kalteng dapat mencapai 100 persen. Sebelumnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kalteng menyampaikan keluhan masyarakat terkait ketersediaan kelistrikan. Pasalnya, ketergantungan pada kelistrikan dirasa semakin tinggi dan ketersediaan kelistrikan dirasa belum merata. "Kondisi tersebut disebabkan oleh banyaknya peralatan yang penggunaannya harus dikoneksikan dengan listrik," kata jurubicara FPPP Awaludin Noor terkait Raperda Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi. Politikus ini menyampaikan, keterbatasan listrik dengan freksuensi kebutuhan semakin hari semakin tinggi. Sehingga, tambah Awaludin, perlu ada pemikiran komprehensif guna mengatasi keterbatasan tersebut. "Kami berharap, ketersediaannya dapat memenuhi kebutuhan, akibatnya, pemenuhan kebutuhan listrik berbatas," katanya. "Kebutuhan berbatas tersebut maksudnya adalah pelaksanaan atas keadilan dan pemerataan. Untuk pemenuhan kebutuhan berbatas itulah, regulasi dari Gubernur harusnya menuju ke arah tersebut," imbuhnya. Disampaikannya juga, dalam konteks ketersediaan energi, Kalteng setidaknya memiliki sumberdaya air guna pembangkit listrik.

Ketersediaannya, kata Awaludin, mesti dapat perhatian guna pemanfaatan pemenuhan kebutuhan listrik. "Ke arah itulah seharusnya rancangan peraturan daerah dilatarbelakangi," tegasnya.

**Masalah Klasik Yang Perlu Kejelasan**

Permasalahan pembangunan tersebut hanya mungkin tercapai apabila pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial-politik dalam pelaksanaannya dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan. Dalam kaitan ini, implikasinya adalah perlunya jaminan tentang: *Pertama*, Persamaan dalam menikmati hak-hak ekonomi, sosial-politik, dan budaya; negara dapat melakukan batasan-batasan terhadap pelaksanaan hak ini melalui pengaturan dalam undang-undang sejauh tidak bertentangan dengan hakekatnya dan sematamata demi tujuan memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis dan *Kedua,* Memberikan jaminan kepada setiap orang atas standar penghidupan yang layak, bebas dari kelaparan, dan menikmati standar hidup yang memadai yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani.

Permasalahan yang terjadi di Kalteng selama ini merupakan masalah yang klasik yang berusaha untuk diselesaikan dengan baik. Masalah kemiskinan di Kalteng terutama penduduk yang terkonsentrasi di pedesaan lebih mengarah kepada persoalan keterisolasian infrastruktur. Oleh karena itu Pemprov Kalteng melalui visi Gubernurnya berusaha untuk membuka isolasi tiap-tiap daerah yang sangat tertinggal tersebut. Berbagai program kedaerahan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)/ Program

Membangun dan Menjaga/Memelihara Desa/Kelurahan terus dilakukan agar Desa-desa tertinggal menjadi maju dan sejahtera. Demikian pula dalam hal pendidikan dan kesehatan. Ada program Kalteng Harati/ Kalteng Pintar dan Kalteng Barigas/Kalteng Sehat serta berbagai program lainnya dari tiap-tiap daerah. Meskipun demikian adanya nuansa kepentingan politis masih melekat di setiap program-program tersebut. Sebagai contoh; program pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemprov juga dibuat oleh pemkab/kota. Padahal seharusnya program-program tersebut harus saling bersinergi dan saling berkesinambungan, program "keroyokan" dari pemprov dan pemkab/kota terhadap kemiskinan setidaknya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap angka kemiskinan di Kalteng setelah Program tersebut tidak lagi berjalan.

Masalah klasik berikutnya adalah masalah listrik. Kalteng yang kaya akan sumber daya alam sepertinya hanya dibiarkan saja oleh pemerintah pusat ketika masih sentralisasi. Sulit untuk Kalteng dapat berkembang jika listrik masih menjadi masalah hingga saat ini. Tidak hanya di kota saja, sampai ke pelosok pun listrik masih menjadi permasalahan. Masyarakat sering mengeluh listrik yang "mati-hidup" sementara pembayaran listrik tidak boleh mengalami keterlambatan. Selanjutnya masalah klasik yaitu ketidakjelasan permasalahan tanah. Masyarakat banyak mengeluh adanya keterbatasan dalam memaksimalkan hasil hutan akhir- akhir ini. Sejak adanya larangan dan sanksi terhadap tindakan *illegal logging*, *illegal fishing dan illegal mining*, menyebabkan usaha rakyat yang bergantung pada hal tersebut menjadi bangkrut. Belum lagi tanah-tanah adat maupun warisan turun-temurun yang sulit untuk diperlihatkan kejelasan melalui sertifikat hak

milik menjadi bermasalah tatkala perusahaan besar swasta baik itu perkebunan maupun tambang melakukan pengambil alihan hak sesuai dengan Izin Prinsip yang telah diperoleh dari pemkab.

Masalah klasik yang terakhir adalah kian mengemukanya wacana pemekaran daerah. Wacana pemekaran daerah kerap kali juga menjadi bahan jualan dalam pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada Gubernur). Sejak terbentuknya Provinsi Kalteng, masalah letak ibukota sempat mencuat sebelum ditetapkannya Palangka Raya sebagai ibukota. Mereka yang kurang puas akan kemajuan dan kesejahteraan pembangunan ekonomi, sosial-politik di Kalteng memilih dan mendukung untuk Kalteng dimekarkan menjadi tiga provinsi. Secara alasan untuk kesejahteraan masyarakat dapat diterima. Namun ada gambaran lain yang dapat dilihat yaitu mulai tumbuhnya keretakan persatuan sesama suku Dayak di Kalteng.

**Kesimpulan**

Pembangunan Sosial-Politik merupakan aspek penting selain dari pembangunan ekonomi. Betapa pun tingginya angka pertumbuhan ekonomi namun masyarakat masih mengeluhkan pencapaian kesejahteraan yang adil dan merata maka hal tersebut belum memberikan pengaruh yang berarti bagi masyarakat secara keseluruhan. Perubahan pembangunan sosial-politik di Kalimantan Tengah masih diwarnai dengan persoalan klasik yang sejak pemerintahan masih sentralistis hingga desentralisasi kini belum terselesaikan dengan baik. Untuk itu peran pemerintah daerah dan pusat dalam memberi porsi

perhatian yang lebih untuk kemajuan Kalteng sangat dinantikan oleh masyarakat. Jika itu nyata dalam tindakan dan dapat terlihat bukti konkretnya. Keluhan- keluhan masyarakat Kalteng yang kerap kali dapat kita dengar dan dengan mudah kita dapati ketika pertanyaan diajukan, lambat laun akan berganti dengan apresiasi dan kebanggaan akan kemajuan daerah. Bukan tidak mungkin isu-isu kedaerahan yang dapat memunculkan konflik berangsur-angsur hilang dengan sendirinya.

**Referensi:**

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys*.

Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Khairuddin. H. 2000.*Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

Suharto, Edi. 2008 *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial(Edisi Revisi).* Bandung: Penerbit CV. Alfabeta

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015*, Pemprov Kalteng 2010

*Tantangan Pembangunan Sosial Di Indonesia*, Penyunting: Dr. Didiet Widiowati, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI 2009

[http://www.kaltengpos.web.id/?menu=detail\_atas&idm=5641](http://www.kaltengpos.web.id/?menu=detail_atas&amp;idm=5641)

<http://www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=4325> <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/09/090440778/Akhir-Bulan-Konferensi->

Kelapa-Sawit-Digelar [http://www.antaranews.com/view/?i=1244745887&c=NAS&s=UMM](http://www.antaranews.com/view/?i=1244745887&amp;c=NAS&amp;s=UMM)